



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gedung Juang, Jl. Pulau Mendanau No. 9
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana terlampir yang menjadi tanggung jawab kami terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pangkalpinang, Juli 2019

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RAKHMADI, S.Pd, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19641014 198903 1 012

Mempedomani paragraf 13, 14 dan 15 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi berbasis akrual dan pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah berakhirnya tahun anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai hasil pelaksanaan anggaran kepada kepala daerah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan maupun anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A), maka OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I (Pertama) Tahun 2019;
2. Neraca Periode 30 Juni 2019 beserta lampirannya;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada semester I (satu) Tahun Anggaran 2019 dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, Juli 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

RAKHMADI, S.Pd, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19641014 198903 1 012

BAB I.PENDAHULUAN

- 1.1.Maksud dan Tujuan
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Sistimatika Penulisan Laporan

BAB II.EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGETKENERJA APBD

- 2.1.Ekonomi Makro
- 2.2.Kebijakan Keuangan
- 2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III.IKHTISAR PENCAPAIAN KENERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2.Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1.Entitas Akuntansi/Entitas Laporan keuangan daerah
- 4.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

BAB V.PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1.Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1.Pendapatan
 - 5.1.2.Belanja
 - 5.1.3.Aset
 - 5.1.4.Kewajiban
 - 5.1.5.Ekuitas dana
- 5.2.Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Basis AkruaI atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas, untuk entitas Akuntansi/entitas laporan yang menggunakan basis AkruaI pada SKPD

BAB VI.PENUTUP

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam rangka pelaksanaan perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Kep. Bangka Belitung periode tertentu pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Kep. Bangka Belitung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur semester I periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan ini merupakan Laporan Keuangan Semester I (satu) OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016), Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah dan pecah menjadi 2 OPD yaitu Dinas PU & Penata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan OPD Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Bab VII pasal 3 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasal 93 menyebutkan bahwa OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Kep. Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meskipun dikategorikan baru tetap eksis dan terus mengembangkan diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif berupa kerja nyata, berkarya, dan peningkatan kinerja secara terus menerus.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Daerah, Kepala OPD selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Keuangan OPD sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 294 dan Pasal 295 mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan SKPD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disampaikan kepada kepala daerah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya laporan keuangan ini adalah sebagai sarana untuk menyajikan informasi dan laporan yang relevan semester pertama mengenai penatausahaan, pengelolaan dan kondisi keuangan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

b. Tujuan

- 1). Menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai posisi keuangan dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama semester 1 (pertama) pelaporan pada tahun anggaran 2019;
- 2). Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan plafond anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan;
- 3). Menyajikan perkembangan Neraca OPD semester 1 (pertama) .

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)

- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- f. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.59 tahun 2008
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, NoReg Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: 11/2015)
- k. Peraaturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
- l. Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung No. 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A)
- m. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Sistimatika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1.Maksud dan tujuan
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Sistimatika penulisan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target Kinerja

- 2.1.Ekonomi Makro
- 2.2.Kebijakan Keuangan
- 2.3.Indikator pencapaian target keuangan

BAB III.Ikhtisar pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2.Hambatan dan kendala

BAB IV.Kebijakan Akuntansi

- 4.1.Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2.Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3.Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4.Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V.Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1.Rincian dari penjelasan setiap pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1.Pendapatan
 - 5.1.2.Belanja
 - 5.1.3.Aset
 - 5.1.4.Kewajiban
 - 5.1.5.Ekuitas Dana
- 5.2.Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD.

BAB VI Penutup

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1.Ekonomi Makro

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan aktif dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DATA KEPENDUDUKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	RINCIAN DATA	JUMLAH	SATUAN	SUMBER DATA
1.	Jumlah Penduduk	1.372.813	Jiwa	BPS
2.	Jumlah Penduduk Miskin	74.090	Jiwa	BPS
3.	<i>Jumlah Rumah Tangga</i>	349.534	<i>RT</i>	BPS
4.	<i>Jumlah Tenaga Kerja</i>	645.250	Jiwa	BPS

Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BACKLOG - JUMLAH RUMAH BERDASARKANSTATUS KEPEMILIKAN TEMPAT TINGGAL PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	STATUS KEPEMILIKAN TEMPAT TINGGAL	JUMLAH (unit)	SUMBER DATA
1.	Milik Sendiri	317.614	BPS, SUPAS 2015
2.	Kontrak	17.570	BPS, SUPAS 2015
3.	Sewa	3.902	BPS, SUPAS 2015
4.	Bebas sewa, Dinas, Rumah Orang Tua, Lainnya	21.897	BPS, SUPAS 2015
	TOTAL	360.983	BPS, SUPAS 2015

Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,30 persen, cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,79 persen. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 60.992,088 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 56.373,615 miliar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2016 besarnya mencapai Rp 45.961,462 miliar, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar Rp 44.159,440 miliar. Potensi kekayaan alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melimpah, yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang cukup besar yaitu sekitar 13 persen perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dengan komoditas utama timah. Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Selama kurun waktu 2011-2016 pendapatan per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, namun masih lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2012, namun kembali meningkat pada tahun 2013-2016, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008-2016 berkurang sebesar 2,44 persen

Kabupaten Bangka dan Belitung Timur termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kabupaten Bangka Tengah terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan

mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Kabupaten Bangka Selatan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang dan Belitung terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secaranyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Jumlah industri mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 11.057 industri, dengan jumlah industri tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung, yaitu sebanyak 2.236 industri dan terendah di Kabupaten Bangka, sebanyak 603 industri. Pertumbuhan produksi industri manufaktur Pengembangan usaha industri manufaktur mikro, kecil dan menengah belum menunjukkan hasil maksimal karena masih terkendala keterbatasan modal, bahan baku, serta pemasaran. Untuk meningkatkan skala industri dan menjadi industri yang berdaya saing industri, jenis usaha manufaktur sering mengalami kendala infrastruktur berupa akses jalan dan jembatan, misalnya sektor usaha perkebunan tebu mengalami kesulitan dalam pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik gula.

Dalam jangka lima tahun kedepan, tantangan pokok penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagaimana memajukan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6% hingga 6,8% pertahun. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, maka pemberdayaan koperasi dan UMKM menduduki peran yang sangat strategis, karena lebih dari 99% jumlah unit usaha di Bangka Belitung sampai akhir 2016 merupakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari seluruh dunia usaha. Jumlah koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir tahun 2016 berjumlah 1.103 koperasi, mengalami kenaikan sebesar 4% dari jumlah koperasi pada tahun 2015 yang berjumlah 1.058 koperasi. Berdasarkan data tahun 2016 usaha mikro, kecil dan menengah mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 0,6% atau sebanyak 1.167 unit UMKM dari tahun 2015 yang berjumlah 208.501 menjadi 209.668 unit UMKM.

2.2.Kebijakan Keuangan

Laporan Keuangan semester pertama tahun anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 sebesar **Rp. 21.864.669.094,00** (*dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah lima*) yang terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.260.229.051,00
b.Belanja Langsung	RP.15.604.440.043,00

Realisai belanja semester pertama pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp.5.685.387.495,70** (*lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sen*), atau mencapai 26,00 % dari pagu anggaran .

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan semester pertama tahun 2019 mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Dari neraca per 30 juni 2019 OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diinformasikan bahwa nilai asset adalah **Rp. 25.909.976.113,42** (*dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah empat puluh dua sen*) yang terdiri dari asset lancar pada kas bendahara pengeluaran sebesar **Rp. 17.160.140.368,50** (*tujuh belas milyar seratus enam puluh juta seratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen*), asset tetap sebesar **Rp.6.631.908.827,92**(*enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen*). Jumlah kewajiban per 30 Juni 2019 adalah sebesar **Rp. 416.341.167,00** (*empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari kewajiban jangka pendek **Rp. 416.341.167,00** (*empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) dan kewajiban jangka panjang sebesar **Rp. 0,- (nol)**, jumlah ekuitas per 30 Juni 2019 adalah sebesar **Rp. 25.284.634.946,42** (*dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh dua sen*).

2.3.Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Belanja OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.114.209.322,00
b. Belanja Langsung	RP. 2.571.178.173,70

Total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun semester I tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.5.685.387.495,70 (lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sen)**, atau mencapai 26,00 % dari total anggaran tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam DPPA SKPD sebesar **Rp. 21.864.669.094,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah lima)**.

OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan OPD baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, Sedangkan realisasi belanja langsung dapat dicapai sebesar RP. 3.114.209.322,00 dari total anggaran SKPD sebesar RP. 6.260.229.051,00 (dapat diserap 17,06 %), berkurang jika dibandingkan dari realisasi belanja langsung pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 3.209.551.600,00.

Realisasi fisik dan keuangan semester pertama belanja tidak langsung dan belanja langsung dari pelaksanaan anggaran SKPD pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- Realisasi fisik	39,87 %
- Realisasi keuangan	26,00 %

OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada semester I (pertama) tahun anggaran 2019 dapat pencapaian target fisik sebesar 40,79% dengan menggunakan anggaran sebesar 33,12%, dengan deviasi fisik sebesar 0,22% dan keuangan 7,12% .

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Belanja Semester Pertama OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.5.685.387.495,70 (lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sen)**, yang terdiri dari :

A. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 6.260.229.051,00 (enam milyar dua ratus dua enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah)** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 3.114.209.322,00 (tiga milyar seratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)**. Realisasi fisik belanja tidak langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 49,75 % dan realisasi keuangan sebesar 49,75 % yang dipergunakan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang, yang terdiri dari PNS golongan IV sebanyak 6 orang , PNS golongan III sebanyak 32 orang, PNS golongan II sebanyak 10 orang dengan jumlah tanggungan sebanyak 104 orang terdiri dari isteri/suami sebanyak 40 orang dan anak sebanyak 64 orang.

Total anggaran belanja tidak langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik sebesar 82% atau Rp. 1.140.198.496,48 dari anggaran tahun 2018.

B. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 15.604.440.043,00 (lima belas milyar enam ratus empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.571.178.173,70 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sen)**. Realisasi fisik belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester I (pertama) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 17,06% dan realisasi keuangan 17,06 % yang dipergunakan untuk membiayai belanja langsung SKPD yang meliputi 3 program dan 13 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan :
 1. Pelayanan adiministrasi perkantoran.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 4. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

2. Program keciptakaryaan dan permukiman :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan kawasan permukiman.
 - Penyusunan DED peningkatan kualitas kawasan kumuh.
 - Penyusunan dokumen baseline kawasan kumuh.
 - Penyusunan dokumen RP3KP.
 2. Peningkatan / perluasan jaringan distribusi air minum dan sambungan rumah.
 3. Pembangunan / peningkatan jalan lingkungan permukiman di kawasan kumuh.
 4. Pembangunan / peningkatan Sarana Persampahan di kawasan Kumuh.
3. Program pembangua perumahan rakyat :
 1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
 2. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana.
 3. Sosalisasi rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana.
 4. Rapat koordinasi bidang perumahan.

Total anggaran belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dengan total anggaran sebesar ***Rp. 21.864.669.094,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah lima).***

C. Belanja Modal

1. Belanja modal OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 yang dapat membentuk aset tetap OPD dilakukan melalui program Program peningkatan pelayanan pemerintahan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terjadi Penambahan asset OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Semester I (Pertama) tahun anggaran 2019 berjumlah Rp. 0 (nol).

Berdasarkan laporan penyusutan aset tetap semester I (pertama) tahun anggaran 2019 terdapat akumulasi penyusutan:

- Akumulasi penyusutan aset tetap	Rp. 1.160.472.004,00
- Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	Rp. 27.281.250,00
- Akumulasi penyusunan aset lain-lain	Rp. 95.076.833,00

3.2. Hambatan atau Kendala

Hambatan atau kendala yang dihadapi OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada semester pertama tahun 2019 antara lain:

1. Sarana dan prasarana kantor yang masih harus ditingkatkan

OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan kewenangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi mempunyai cakupan wilayah kerja yang luas yaitu pada 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki mobil dinas operasional sebanyak 2 unit, 1 unit minibus Toyota Innova, 1 Unit Minibus Sienta, 1 Unit Double cabin Hilux tahun 2009 (sudah dikembalikan ke OPD asal perolehan asset) dan 8 Unit kendaraan roda dua (motor) dimana 6 unit sudah dikembalikan ke BAKEUDA bagian Asset dan 2 Unit yang dipergunakan sebagai kendaraan, sehingga dibutuhkan penambahan mobil dinas minimal sebanyak 1 unit.

Saat ini OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki gedung kantor sendiri, namun untuk sarana dan prasarana kantor sudah cukup memadai meskipun belum presentatif sehingga belum memberikan rasa nyaman bagi para pegawai dalam bekerja.

2. Tenaga pegawai (SDM) masih belum memadai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 47 orang dengan perincian eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 6 orang dan staf sebanyak 38 orang. Untuk saat ini OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan staf teknis, arsiparis dan perencanaan minimal sejumlah 2 orang per sub seksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam pelaksanaannya mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah basis akuntansi dengan sistem basis akrual (*accrual basic*) mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Basis akrual (*accrual basic*) digunakan pada penyusunan neraca SKPD yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh terhadap keuangan SKPD.

4.3. Basis Pengukuran

Basis pengukuran adalah proses penetapan nilai uang pada saat pengakuan dan memasukkannya di setiap pos dalam laporan keuangan OPD. Nilai uang yang terdapat pada setiap laporan keuangan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah rupiah murni.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

SKPD OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan daerah yang dikelolanya.

POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk semester pertama yang berakhir 30 Juni 2019 dengan rincian :

- Belanja Pegawai	: Rp. 3.114.209.322,00
- Belanja Barang	: Rp. 2.571.178.173,70
- Belanja Peralatan dan Mesin	: -
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	: -

5.1.1.Pendapatan

Pendapatan daerah yang dihasilkan oleh OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.0,- (nol)

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester pertama tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.5.685.387.495,70 (lima enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh sen)** atau tercapai 26,00 % dari total anggaran tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA SKPD **Rp. 21.864.669.094,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah lima)**. dengan realisasi fisik sebesar 49.75 %

5.2. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan tentang kondisi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada Dinas OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk semester I (pertama) yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

5.2.1.Aset

1.Aset Lancar

Asset lancar OPDPerumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 Juni 2019 berjumlah **Rp. 16.951.140.368,50 (enam belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen)**

2.Aset Tetap

Aset tetap OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan pada tanggal 30 Juni 2019 berjumlah sebesar **Rp. 6.631.908.827,92 (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus**

delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen), kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar **Rp. 7.059.901.148,92** yaitu akumulasi penyusutan yang semakin besar setiap periode, meskipun ada kenaikan akibat mutasi barang peralatan dan mesin sebesar **Rp. 141.285.000,00**.

Untuk asset peralatan dan mesin sudah bisa ditetapkan sebagai asset tetapi untuk jalan, irigasi dan jaringan masih dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan assetnya akan diakui setelah pekerjaan konstruksi selesai 100%.

Asset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda 2 dengan kode barang 02.03.01.05.01 sebanyak 6 unit merk yamaha new aerox sudah diserahkan ke BAKEUDA bag. Asset Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai keseluruhan Rp. 141.285.000,00.

Asset tanah bangunan kantor pemerintah yang dipergunakan oleh Balai Cipta Karya, Kementrian PUPR senilai Rp. 25.988.000,25 sudah dilakukan proses alih status termasuk Asset jalan lingkungan/halama di Dermaga Polair, Air Anyir senilai Rp. 1.731.660.000,00.

Berdasarkan laporan penyusutan asset tetap pada semester pertama tahun anggaran 2019 senilai Rp. 1.160.472.004,00

5.2.2. Kewajiban

Pada neraca OPD semester pertama tahun anggaran 2019 terdapat kewajiban jangka pendek (utang belanja) sebesar **Rp. 416.341.167,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah)** yang terdiri dari :

- SPP gaji ke 13 Rp. 186.979.721,-
- Kekurangan gaji bulan apri-JuniRp. 1.297.846,-
- TPP ke 13.....Rp. 228.063.600,-

Sementara untuk kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,- (nol).

5.2.3.EKUITAS DANA

Ekuitas dana OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 30 juni 2019 sebesar **Rp.25.284.634.946,42- (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh dua sen)** dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah asset	Rp. 25.700.976.113,42
- Dikurangi utang belanja barang	(Rp 416.341.167,00)
- Ekuitas SKPD	Rp. 25.284.634.946,42

Terbilang : **dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh dua sen.**

5.3.PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS UNTUK ENTITAS AKUNTANSI /ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA OPD

Pada Semester I (pertama) tahun 2019 tidak terdapat pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah.

- Adanya selisih antara buku bank pada rekening koran dengan saldo buku pada Buku Kas Umum yang ada di pembukuann Dinas Perkim, dikarenakan pencatatan pembukuan **gaji** selalu dicatat pada akhir bulan dan seterusnya, sementara pencairan yang terekam pada rekening koran selalu di bulan berikutnya, demikian seterusnya.
- Terdapat selisih Buku kas dan Rekening Koran dikarenakan Gaji 13 masuk ke rekening bendahara tanggal 31 Mei 2019 sementara Gaji dibayar ke ASN bulan Juni 2019 sebesar Rp. 180.115.617,-
- Terdapat selisih pada bulan maret 2019 sebesar Rp. 440.00,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) yaitu kelebihan transper ke rekening saudara Benny Sutioko dan sampai sekarang belum ditranfer kembali oleh bank ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Perkim dikarenakan proses administrasi.
- Terdapat selisih sebesar Rp.1,- (satu rupiah) antara nilai Buku kas dan Buku bank akibat pembulatan pada waktu transfer dan sudah disetorkan bendahara.
- Terdapat kelebihan pembayaran TPP pada bulan juni akibat pembulatan dibelakang koma dan sudah disetorkan bendahara.
- Pada neraca terdapat kewajiban jangka pendek (utang belanja) sebesar **Rp. 416.341.167,-** (*empat ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari :
 - - SPP gaji ke 13 Rp. 186.979.721,-
 - - Kekurangan gaji bulan apri-JuniRp. 1.297.846,-
 - - TPP ke 13.....Rp. 228.063.600,-
- Belum dibayarnya BPJS Tenaga kontrak sebanyak 5 Orang atas nama :
 1. Halida
 2. Sulastri
 3. Robinson
 4. Fauzi
 5. Yessi Karmila
- Terdapat selisih akibat kekurangan pembayaran gaji bulan Juni di buku kas tercatat Rp.1.575.790,- sementara di rekening koran sebesar Rp. 1.370.400,- (hanya mencetak nilai bersih)

Demikian laporan keuangan OPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kami sampaikan sebagai bahan laporan wajib yang harus disampaikan oleh setiap OPD ke BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Kami sangat menyadari bahwa laporan yang kami buat ini belumlah sempurna dan laporan ini masih bersifat sementara dan akan kami perbaiki penyempurnaannya dalam laporan semester dua berikutnya.

Kami mengharapkan tanggapan, masukan, saran, kritik yang mendukung dalam penyempurnaan pembuatan laporan ini dari para pengguna laporan, sehingga laporan keuangan semester pertama ini dapat bermanfaat maksimal bagi kita semua.

Kami akan terus berupaya agar laporan keuangan semester pertama ini untuk selalu disempurnakan di akhir tahun atau semester dua mendatang agar laporan keuangan OPD dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan siap dipertanggungjawabkan.

Pangkalpinang, Juni 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

RAKHMADI, S.Pd, M.A
Pembina Utama Muda
NIP. 19641014 198903 1 012

LAMPIRAN

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN SEMESTER PERTAMA**



TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG